

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis kontribusi penilaian masyarakat atas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pembentukan kepercayaan publik pada Pemerintahan Prabowo-Gibran di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam kajian ini dengan menghimpun data melalui penyebaran kuesioner kepada 129 responden, yakni warga Jawa Barat yang memiliki pengetahuan serta mengikuti perkembangan pelaksanaan program MBG. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembuktian tersebut ditunjukkan oleh hasil estimasi regresi linear sederhana serta pengujian signifikansi statistik yang secara konsisten menghasilkan keputusan penolakan H_0 dan penerimaan H_i .

Selain itu, analisis berdasarkan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini juga memperkuat temuan tersebut.

1. Melalui perspektif Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat dimensi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, secara umum masih berada pada kategori sedang menuju rendah. Dimensi komunikasi menjadi satu-satunya dimensi dengan sebagian indikator berada pada kategori sedang, ditopang oleh penilaian yang cukup baik terhadap transmisi dan kejelasan informasi, meskipun konsistensi informasi antar sumber masih dinilai rendah. Sementara itu, dimensi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi seluruhnya berada pada kategori rendah, yang mencerminkan penilaian masyarakat terhadap masih kurangnya kesiapan tenaga pelaksana, fasilitas pendukung, ketepatan penempatan petugas, serta standar operasional dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program.
2. Melalui perspektif Teori Kepercayaan Publik oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2017), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga dimensi kepercayaan publik, yaitu kompetensi, kepedulian (benevolence), dan

integritas, seluruhnya berada pada kategori rendah. Temuan ini menggambarkan bahwa keraguan masyarakat terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran terjadi secara konsisten pada seluruh aspek kepercayaan, baik dari sisi kemampuan pemerintah menjalankan tugas, keberpihakan terhadap kepentingan publik, maupun konsistensi antara komitmen dan tindakan nyata. Meskipun demikian, dimensi kepedulian memperoleh penilaian yang relatif lebih baik dibandingkan dua dimensi lainnya, yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih lebih percaya pada adanya niat baik pemerintah dibandingkan kemampuan dan integritasnya dalam merealisasikan niat tersebut.

Penelitian ini membuktikan bahwa penilaian masyarakat terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kepercayaan publik pada Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Hal tersebut ditunjukkan melalui persamaan regresi linear sederhana $Y = -6,164 + 1,057X$, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan pada variabel penilaian masyarakat terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diikuti oleh kenaikan sebesar 1,057 satuan pada variabel Kepercayaan Publik. Pengaruh tersebut dinyatakan signifikan berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 22,777, lebih besar daripada t tabel sebesar 1,979, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Di samping itu, hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,803 menunjukkan bahwa variabel penilaian masyarakat terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menjelaskan 80,3% variasi Kepercayaan Publik, sementara sisanya sebesar 19,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penilaian masyarakat terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kepercayaan publik pada Pemerintahan Prabowo-Gibran di Provinsi Jawa Barat.

Secara keilmuan, temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang baru terbentuk tidak dibentuk oleh implementasi kebijakan itu sendiri, melainkan oleh bagaimana implementasi tersebut dinilai dan dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya

kontribusi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai oleh masyarakat terhadap variasi kepercayaan publik dalam penelitian ini. Temuan ini juga mengungkap bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang baru terbentuk masih lebih banyak bersandar pada keyakinan atas niat baik pemerintah dibandingkan bukti nyata kompetensi dan integritasnya dalam menjalankan program, mengingat dimensi kepedulian secara konsisten memperoleh penilaian lebih tinggi dibandingkan kompetensi dan integritas. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur kebijakan publik melalui bukti empiris baru mengenai keterkaitan implementasi program quick win yang dinilai oleh masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang baru terbentuk pascapemilu di Indonesia.

5.2 Saran

Terlepas dari temuan yang diperoleh, penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan substantif dan metodologis. Cakupan wilayah kajian yang berfokus pada Provinsi Jawa Barat dengan penerapan teknik purposive sampling membatasi daya jangkau temuan, sehingga hasil analisis tidak dapat digeneralisasi untuk mencerminkan kondisi populasi secara nasional. Di samping itu, penyusunan pemodelan hanya menempatkan penilaian masyarakat atas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai variabel independen tunggal. Skema ini menyebabkan berbagai determinan eksternal lain yang berpotensi memengaruhi dinamika kepercayaan publik belum terekspos dalam model analisis. Berdasarkan keterbatasan tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi pengembangan studi berikutnya serta para pemangku kepentingan terkait, sebagai berikut.

5.2.1 Saran Akademis

Kontribusi terhadap kebijakan publik menjadi poin pertama yang diangkat dalam kajian ini, khususnya bukti empiris mengenai keterkaitan antara penilaian masyarakat atas implementasi program bantuan sosial berskala nasional, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Badan Gizi Nasional (BGN) beserta pemerintah pusat dapat menjadikan temuan ini sebagai masukan strategis dalam menyusun strategi eksekusi kebijakan yang lebih mempertimbangkan dimensi kepercayaan publik, khususnya di wilayah-wilayah

dengan skala implementasi MBG yang besar seperti Jawa Barat. Signifikansi hal tersebut terletak pada pemahaman bahwa keberhasilan suatu program bantuan sosial tidak semata diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, melainkan juga ditentukan oleh legitimasi sosial berupa kepercayaan yang terbangun di tengah masyarakat, sebagaimana tercermin dari penilaian masyarakat atas pelaksanaannya.

Kedua, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan untuk studi mendatang. Penggunaan variabel terikat berupa kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo-Gibran secara menyeluruh pada dasarnya berpotensi dipengaruhi oleh pelbagai faktor di luar implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai oleh masyarakat, mencakup situasi ekonomi nasional, kebijakan luar negeri, isu hukum dan politik, hingga pandangan terhadap kinerja personal presiden. Untuk meminimalkan potensi bias akibat variabel terlupakan yang tidak teramati dalam pemodelan ini, penelitian selanjutnya dianjurkan untuk menetapkan variabel dependen yang lebih terfokus dan spesifik, misalnya kepercayaan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara khusus ataupun legitimasi atas kebijakan MBG itu sendiri.

Selain itu, penggunaan Model Implementasi Edwards III yang pada dasarnya dirancang untuk menganalisis implementasi kebijakan dari perspektif organisasi pelaksana turut menjadi keterbatasan metodologis, mengingat penelitian ini mengukur dimensi-dimensi tersebut melalui penilaian masyarakat yang tidak seluruhnya memiliki akses langsung terhadap informasi mengenai disposisi pelaksana maupun struktur birokrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penelitian selanjutnya disarankan mempertimbangkan pendekatan alternatif yang lebih sesuai dengan perspektif penerima layanan, seperti model SERVQUAL, Citizen Satisfaction Index, atau perceived policy performance, untuk menghasilkan pengukuran yang lebih valid dari sudut pandang masyarakat.

Selanjutnya, pelaksanaan penelitian ini berfokus pada responden yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat dengan keragaman karakteristik sosial, demografis, maupun politik. Heterogenitas tersebut berpeluang memberikan warna tersendiri terhadap penilaian masyarakat atas implementasi Program Makan Bergizi Gratis maupun derajat kepercayaan publik kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran. Oleh sebab itu, studi mendatang disarankan untuk memasukkan variabel kontrol

tambahan, seperti preferensi politik pada Pilpres 2024, afiliasi partai politik, atau orientasi ideologis responden, guna menyajikan analisis yang lebih komprehensif mengenai dinamika keterkaitan antarvariabel. Di samping itu, perluasan cakupan wilayah kajian hingga menjangkau lintas provinsi atau skala nasional sangat dianjurkan agar temuan penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi.

Terakhir, penelitian ini menegaskan bahwa kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan bersifat empiris, yaitu pada konteks studi kasus implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, mengingat hubungan antara kinerja kebijakan (*policy performance*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan kepercayaan publik (*public trust*) telah banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya kajian ini dengan pendekatan longitudinal atau komparatif antarwilayah untuk memperkuat generalisasi temuan.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran praktis yang dapat menjadi masukan bagi pihak penyelenggara langsung Program Makan Bergizi Gratis.

1. BGN dan SPPG disarankan memperkuat pengawasan kesiapan dapur dan tenaga pelaksana, termasuk kelengkapan sertifikasi keamanan pangan, guna memperbaiki dimensi sumber daya dan struktur birokrasi yang masih dinilai rendah oleh masyarakat.
2. BGN disarankan membangun mekanisme evaluasi dan pelaporan capaian program secara berkala untuk menjaga konsistensi informasi kepada publik, mengingat konsistensi informasi menjadi titik lemah pada dimensi komunikasi.
3. BGN dan pemerintah daerah disarankan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan MBG, merespons temuan fragmentasi kewenangan pada dimensi struktur birokrasi.
4. Pemerintahan Prabowo–Gibran secara umum disarankan menjaga konsistensi antara komitmen yang disampaikan kepada publik dan realisasinya di lapangan, mengingat rendahnya penilaian pada dimensi kompetensi dan integritas pemerintahan dalam penelitian ini.